



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
UNIT KERJA : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GATOT TRI SURYANTA
2. Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
3. NHK : 200629

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	11.085.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/140 m2 di KAB / KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 499 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	700.000.000
1. MOBIL, PAJERO DAKAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. MOBIL, CAMRY TIPE 2.5 V A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. MOBIL, MAZDA CX.3 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	560.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.340.412.631
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.685.412.631



III. HUTANG

Rp. 1.005.037.930

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 13.680.374.701

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.